



PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *INVENTORY INTENSITY*, *INSTITUTIONAL OWNERSHIP* DAN *CONCENTRATED OWNERSHIP* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR BEI

Raden Vina Nur Aprilia¹⁾, Ricky Agustiady²⁾, Zainal Aripin³⁾, Fitriana⁴⁾, Iqbal Rizki Maulana⁵⁾

^{1,2,3,4,5)} Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sangga Buana

¹⁾ Vinanuraprilialia@Gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

August 19, 2026

Revised

August 31, 2026

Accepted:

August 31, 2026

Online available:

September 10, 2026

Keywords:

Tax Avoidance; Capital Intensity; Inventory Intensity; Institutional Ownership; Concentrated Ownership.

*Correspondence:

Name: Raden Vina Nur Aprilia

E-mail: vinanuraprilialia@Gmail.com

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: *Tax avoidance remains an important issue because corporate tax avoidance practices may reduce potential state tax revenues. This study aims to examine the effect of capital intensity, inventory intensity, institutional ownership, and concentrated ownership on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2023.*

Methods: *This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from annual reports and financial statements of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample was selected using purposive sampling and consisted of 86 companies, resulting in 258 firm-year observations. Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Rate, and the data are analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics version 25.*

Results: *The results indicate that capital intensity, inventory intensity, institutional ownership, and concentrated ownership simultaneously have a significant effect on tax avoidance, with an F-statistic of 29.184 and a significance level of 0.000. Partially, capital intensity has a significant negative effect on Cash Effective Tax Rate with a significance level of 0.004, inventory intensity has a significant negative effect with a significance level of 0.005, and concentrated ownership has a significant negative effect with a significance level of 0.023. In contrast, institutional ownership has a significant positive effect on Cash Effective Tax Rate with a significance level of 0.005.*

Conclusion and suggestion: *The study concludes that investment characteristics and ownership structures play an important role in influencing corporate tax avoidance. Capital intensity, inventory intensity, and concentrated ownership are associated with higher tax avoidance, while institutional ownership tends to reduce tax avoidance through stronger managerial monitoring. Therefore, companies are encouraged to strengthen corporate governance and manage assets and inventories effectively while maintaining tax compliance. The government, particularly the tax authority, is also encouraged to strengthen monitoring of companies with specific investment and ownership characteristics.*



PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki prospek ekonomi yang kuat, sehingga menarik minat investor maupun pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. Perkembangan tersebut turut mendorong bertambahnya jumlah perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha dan membuka kantor di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran perusahaan memberikan dampak positif bagi perekonomian melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan kegiatan produksi dan perdagangan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, keberadaan dunia usaha menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang penerimaan pajak yang berperan sebagai sumber pendapatan bagi negara.

Namun demikian, peran penting dalam pendapatan negara, realisasi penerimaan pajak masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, penerimaan pajak tumbuh sebesar 50,9%, sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhannya hanya mencapai 9,4%. Dengan demikian, terjadi perlambatan pertumbuhan sebesar 41,5%. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi salah satu agenda penting pemerintah, khususnya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penguatan efektivitas dalam pelaksanaan sistem perpajakan.

Penurunan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari industri manufaktur merupakan fenomena yang penting untuk ditelaah lebih mendalam. Salah satu faktor yang kerap dikaitkan dengan kondisi tersebut adalah adanya praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Melalui berbagai strategi perpajakan yang tetap berada dalam batas ketentuan hukum, perusahaan dapat berupaya menekan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Meskipun secara hukum tidak selalu termasuk pelanggaran, praktik *tax avoidance* dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, terutama dari sektor manufaktur yang memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian Indonesia.

Tax avoidance merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku. Praktik ini dapat dilakukan melalui pengaturan transaksi, pemanfaatan aset, maupun kebijakan keuangan tertentu untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Meskipun berada dalam batas legalitas, *tax avoidance* berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara sehingga menjadi perhatian pemerintah dan otoritas pajak. Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif *agency theory*, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen yang berupaya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan pemerintah yang berkepentingan mengoptimalkan penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong manajemen mengambil strategi tertentu untuk menekan beban pajak perusahaan (OECD, 2020).

Fenomena *tax avoidance* tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi telah menjadi persoalan global seiring meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis internasional, mobilitas modal, dan aktivitas perusahaan multinasional. Kondisi tersebut mendorong berbagai negara mengembangkan kebijakan dan kerja sama internasional, termasuk melalui *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), untuk mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (Alm, 2023). Di Indonesia, pemerintah juga terus memperkuat sistem administrasi dan pengawasan perpajakan melalui digitalisasi dan pembaruan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pengawasan wajib pajak. Namun, *tax avoidance* masih menjadi tantangan karena berpotensi menekan penerimaan negara, sehingga penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi praktik tersebut.

Sejumlah karakteristik dan kebijakan perusahaan dapat menjadi faktor yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, di antaranya *capital intensity*, *inventory intensity*, *institutional ownership*, dan *concentrated ownership*. *Capital intensity* diduga memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance* karena tingginya proporsi investasi perusahaan pada aset tetap dapat menghasilkan beban penyusutan yang relatif besar. Secara perpajakan, beban penyusutan yang

memenuhi ketentuan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga berpotensi menurunkan dasar pengenaan pajak dan jumlah kewajiban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan memanfaatkan beban penyusutan sebagai bagian dari strategi pengelolaan beban pajaknya (Ravanelly & Soetardjo, 2023).

Selain *capital intensity*, *inventory intensity* juga dipandang sebagai salah satu faktor yang berpotensi berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Tingginya proporsi investasi perusahaan dalam persediaan dapat menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya biaya yang berkaitan dengan penyimpanan, pengelolaan, pemeliharaan, serta risiko penanganan persediaan. Beban-bekan tersebut pada kondisi tertentu dapat diakui sebagai biaya operasional perusahaan dan selanjutnya memengaruhi besarnya laba sebelum pajak. Penurunan laba sebelum pajak pada akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya dasar pengenaan pajak dan kewajiban perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, tingkat *inventory intensity* yang tinggi secara teoritis dapat menciptakan ruang bagi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya (Sari & Indrawan, 2022).

Selanjutnya, *institutional ownership* dipandang sebagai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance*. Pemegang saham institusional umumnya memiliki sumber daya, kompetensi, dan kapasitas pengawasan yang lebih kuat dalam memantau tindakan serta kebijakan yang diambil oleh manajemen. Mekanisme pengawasan tersebut dapat mencakup evaluasi terhadap kebijakan perpajakan perusahaan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi serta risiko hukum dan reputasi. Dengan demikian, semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin kuat pula fungsi monitoring terhadap manajemen, sehingga dapat membatasi kecenderungan perusahaan untuk menerapkan strategi *tax avoidance* yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan maupun reputasi perusahaan (Juliani & Finatariyani, 2023)

Sementara itu, *concentrated ownership* juga dapat menjadi salah satu determinan yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memberikan pengaruh dan kendali yang lebih besar kepada pemegang saham mayoritas dalam menentukan arah serta kebijakan strategis perusahaan. Pemegang saham pengendali pada umumnya memiliki kepentingan yang kuat terhadap peningkatan nilai perusahaan dan optimalisasi tingkat pengembalian investasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola beban perusahaan, termasuk melalui penerapan strategi efisiensi pajak. Dengan demikian, konsentrasi kepemilikan berpotensi mendorong perusahaan untuk mengambil kebijakan perpajakan yang lebih agresif guna meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan, sepanjang strategi tersebut masih berada dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku (Kinanti et al., 2023).

Meskipun *tax avoidance* pada dasarnya dilakukan dalam batas ketentuan hukum dan tidak secara eksplisit melanggar regulasi perpajakan, praktik tersebut tetap menimbulkan perdebatan dalam perspektif etika bisnis. Dari sudut pandang moral, *tax avoidance* dapat dipersepsikan sebagai bentuk perilaku oportunistik ketika perusahaan secara aktif memanfaatkan celah atau ketidakselarasan dalam ketentuan perpajakan untuk menekan kewajiban pajaknya. Strategi tersebut dapat meningkatkan keuntungan setelah pajak bagi perusahaan, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap kepentingan publik karena berkurangnya kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara (Dwimartha et al., 2024).

Dalam penerapannya, praktik *tax avoidance* tidak terlepas dari potensi munculnya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen (*agent*) dan pemegang saham sebagai prinsipal (*principal*). Manajemen memiliki kepentingan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang positif melalui pencapaian dan pelaporan laba yang optimal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, maupun pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, tingkat laba yang semakin tinggi pada umumnya akan meningkatkan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga berimplikasi pada bertambahnya beban pajak yang harus dipenuhi perusahaan. Kondisi tersebut dapat menciptakan dorongan bagi manajemen untuk mempertimbangkan berbagai strategi perpajakan guna mengoptimalkan laba setelah pajak tanpa mengabaikan ketentuan perpajakan yang berlaku (Hanlon & Heitzman, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Pada variabel *capital intensity*, Artinasari dan Mildawati (2019) menemukan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan (Ravanelly & Soetardjo, 2023) menemukan pengaruh negatif. Sementara

itu, Nugrahadhi dan Rinaldi (2021) serta Izzati (2022) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketidakkonsistenan juga ditemukan pada variabel *inventory intensity*, di mana Nugrahadhi dan Rinaldi (2021) menemukan adanya pengaruh signifikan, sedangkan Izzati (2022) serta Artinasari dan Mildawati (2019) menemukan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada aspek struktur kepemilikan, penelitian mengenai *concentrated ownership* juga masih menunjukkan ruang penelitian yang cukup besar, sementara hasil penelitian mengenai *institutional ownership* menunjukkan arah yang berbeda (Alkurdi & Mardini, 2020) serta Tarmidi dan Buana (2024) menunjukkan pengaruh negatif, sedangkan Mita Dewi (2019) menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *empirical gap* yang mengindikasikan bahwa pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *concentrated ownership*, dan *institutional ownership* terhadap *tax avoidance* belum menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Perbedaan karakteristik perusahaan, periode pengamatan, sektor industri, ukuran sampel, proksi variabel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu dapat menjadi salah satu penyebab munculnya perbedaan hasil tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji kembali pengaruh keempat variabel tersebut terhadap *tax avoidance*, khususnya pada objek dan periode penelitian yang berbeda, sehingga dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan faktor karakteristik aset dan struktur kepemilikan sebagai determinan *tax avoidance*. Penelitian ini mengombinasikan *capital intensity* dan *inventory intensity* yang merepresentasikan keputusan perusahaan dalam mengelola aset dengan *institutional ownership* dan *concentrated ownership* yang merepresentasikan mekanisme struktur kepemilikan. Penggunaan *concentrated ownership* secara khusus juga memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai pengaruh pemusatan kepemilikan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, terutama ketika diuji secara bersamaan dengan *institutional ownership*. Kombinasi keempat variabel tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini memiliki kontribusi empiris dalam menjawab ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian mengenai *concentrated ownership* masih relatif terbatas dan menunjukkan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris terbaru mengenai hubungan keempat variabel tersebut terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas bukti empiris mengenai determinan *tax avoidance*, tetapi juga mengintegrasikan perspektif karakteristik aset dan struktur kepemilikan dalam satu model penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agency

Teori agensi (*agency theory*) diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 sebagai suatu kerangka teoritis yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Teori ini berangkat dari adanya kemungkinan perbedaan kepentingan antara prinsipal sebagai pihak yang memberikan mandat dan agen sebagai pihak yang menerima serta menjalankan mandat tersebut. Perbedaan kepentingan tersebut dapat memunculkan konflik keagenan ketika agen memiliki tujuan atau kepentingan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan pada dasarnya berlandaskan pada hubungan kontraktual antara pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Hubungan tersebut menggambarkan pendelegasian wewenang dari pemilik kepada manajemen untuk mengelola sumber daya serta menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan kepentingan yang telah disepakati. (Eisenhardt, 1989). Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat menjadi salah satu sumber permasalahan dalam hubungan keagenan. Jensen dan Smith (1984) menjelaskan bahwa teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk melaksanakan sejumlah tugas dan mengambil keputusan atas nama prinsipal. Dalam hubungan tersebut, prinsipal berperan sebagai pihak yang memberikan mandat, sedangkan agen bertindak sebagai pihak yang menjalankan mandat tersebut melalui pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam

perusahaan. Perbedaan kepentingan serta pembagian wewenang tersebut dapat menimbulkan potensi konflik apabila keputusan agen tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan dan kepentingan prinsipal.

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Tax avoidance dapat dipahami sebagai upaya perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya melalui pemanfaatan ketentuan, fasilitas, maupun celah tertentu dalam regulasi perpajakan yang tersedia secara legal. Strategi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan tanpa melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Cristan & Poniman, 2023). Menurut Santo dan Nastiti (2023), *Praktik tax avoidance* dapat dilakukan dengan memanfaatkan ruang atau celah yang terdapat dalam ketentuan perpajakan untuk menekan besarnya kewajiban pajak perusahaan secara legal. Meskipun penerapannya tidak secara langsung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, praktik tersebut tetap memiliki implikasi terhadap kepentingan fiskal karena dapat menurunkan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Oleh karena itu, *tax avoidance* menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, banyak perusahaan menerapkan strategi ini sebagai upaya meningkatkan laba setelah pajak dan memaksimalkan nilai perusahaan. (Dyrenge et al., 2018)

Dalam penelitian ini, tingkat *tax avoidance* diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (Cash ETR). Proksi ini menunjukkan proporsi pembayaran pajak kas terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai Cash ETR, semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, nilai Cash ETR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Penggunaan Cash ETR sebagai proksi *tax avoidance* mengacu pada rekomendasi (Firmansyah et al., 2020) karena dinilai mampu merepresentasikan pembayaran pajak yang benar-benar dikeluarkan perusahaan.

Capital Intensity

Capital intensity menggambarkan tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional serta mendukung proses penciptaan pendapatan. Tingkat *capital intensity* mencerminkan seberapa besar sumber daya perusahaan dialokasikan dalam bentuk aset tetap dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki. Berdasarkan PSAK 16, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk tujuan administratif, maupun untuk disewakan kepada pihak lain, serta memiliki masa manfaat yang diperkirakan lebih dari satu periode akuntansi. Dengan demikian, keberadaan aset tetap tidak hanya berperan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan dan pembebanan penyusutan selama masa manfaat aset tersebut. Dari perspektif perpajakan, (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021) menjelaskan bahwa aset tetap digunakan sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan, bukan sebagai barang yang diperjualbelikan. Tingginya investasi pada aset tetap akan meningkatkan beban penyusutan yang diakui perusahaan. Beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak sehingga berpotensi menurunkan jumlah pajak terutang (Dwiyanti & Jati, 2019). Ketentuan tersebut juga sejalan dengan PMK Nomor 72 Tahun 2023 yang mengatur bahwa biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga berpotensi menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR). Dalam penelitian ini, *capital intensity* diukur menggunakan rasio antara total aset tetap dan total aset perusahaan sebagaimana dikemukakan (Arimurti et al., 2022).

H1 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Inventory Intensity

Inventory intensity menggambarkan besarnya proporsi investasi perusahaan pada persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Berdasarkan PSAK 16: Persediaan, persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, sedang dalam proses produksi untuk penjualan, atau berupa bahan maupun perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Pengelolaan persediaan yang besar umumnya diikuti dengan meningkatnya biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan penanganan persediaan. Biaya-biaya tersebut pada umumnya diakui sebagai beban sehingga dapat mengurangi laba perusahaan, kecuali biaya yang masih dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan persediaan sesuai ketentuan (IAI, 2024). Oleh karena itu,

semakin tinggi tingkat *inventory intensity*, semakin besar pula biaya yang ditanggung perusahaan, yang berpotensi menurunkan laba kena pajak dan memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *inventory intensity* dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* melalui pengelolaan biaya yang berkaitan dengan persediaan (Amandha Cahyamustika & Meita Oktaviani, 2024)

H2 : *Inventory intensity* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Institutional Ownership

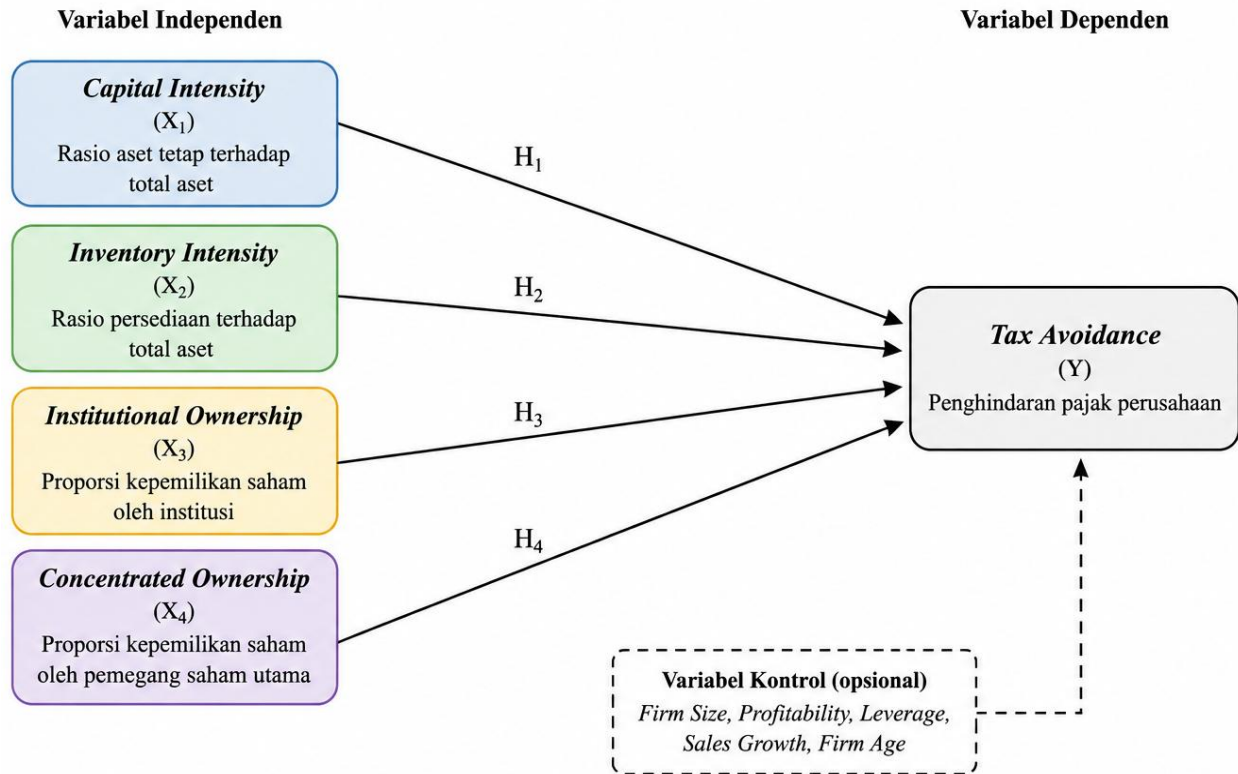
Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh berbagai lembaga atau institusi, seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, pemerintah, maupun institusi lainnya (Anggraini & Wijaya, 2024). Investor institusional umumnya memiliki sumber daya, keahlian, dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. (Rakayana et al., 2021) Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin efektif fungsi monitoring yang dijalankan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset perusahaan serta mengurangi tindakan oportunistik dan pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Lastyanto & Setiawan, 2022)

H3 : *Institutional Ownership* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Concentrated Ownership

Konsentrasi kepemilikan (*concentrated ownership*) mengacu pada struktur kepemilikan saham yang ditandai oleh dominasi kepemilikan pada pihak atau kelompok pemegang saham tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar saham perusahaan dikuasai oleh sejumlah kecil pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan relatif lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memberikan tingkat pengaruh dan kendali yang lebih besar kepada pemegang saham dominan dalam menentukan arah kebijakan serta pengambilan keputusan strategis perusahaan (Sijabat et al., 2020). Wardani & Setiawan (2020) Konsentrasi kepemilikan ditunjukkan oleh adanya pemegang saham dengan proporsi kepemilikan yang relatif besar, sehingga memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam memengaruhi maupun mengendalikan kebijakan perusahaan. Pemegang saham dengan kepemilikan yang signifikan umumnya memiliki posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan perusahaan karena besarnya hak suara yang dimiliki. Dalam konteks tersebut, pemegang saham besar dapat didefinisikan sebagai pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% dari total saham perusahaan. (Salam et al., 2019)

H4 : *Concentrated Ownership* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*



Gambar 1.
Model Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan pada bidang manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang tahun 2021-2023 sebanyak 166 perusahaan. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode dengan penentuan sampelnya berdasarkan pada kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan meliputi: (1) Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023; (2) perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode penelitian; serta (3) perusahaan yang memperoleh laba pada setiap tahun pengamatan, yaitu 2021–2023. Berdasarkan data awal, jumlah populasi penelitian sebanyak 166 perusahaan manufaktur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 perusahaan dikeluarkan dari sampel karena tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian, sedangkan 60 perusahaan lainnya dieliminasi karena mengalami kerugian pada satu atau lebih tahun pengamatan. Dengan demikian, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 86 perusahaan. Mengingat periode penelitian berlangsung selama tiga tahun, maka total unit analisis yang digunakan adalah 258 observasi (86 perusahaan × 3 tahun). Data penelitian diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Britama, serta situs resmi masing-masing perusahaan. Seluruh data kemudian diolah menggunakan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics* versi 25.

Tabel 1
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Periode 2021–2023	166
2.	Perusahaan Yang Secara Konsisten Menerbitkan Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Selama Periode Penelitian	(20)

3.	Perusahaan Yang Memperoleh Laba Pada Setiap Tahun Pengamatan, Yaitu 2021–2023	(60)
Jumlah Sampel Akhir		86
Tahun Observasi		3
Total Data Sampel = 86 x 3 Tahun		258

Sumber : Data Penelitian, 2026

Variabel pada penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah Tax Avoidance (Y). Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *capital intensity* (X₁), *inventory intensity* (X₂), *institutional ownership* (X₃), dan *concentrated ownership* (X₄),

1. $Capital\ Intensity = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$
2. $Inventory\ Intensity = \frac{Jumlah\ Persediaan}{Total\ Aset}$
3. $institutional\ ownership = \frac{Kepemilikan\ Saham\ Institusi}{Total\ Saham\ Beredar}$
4. $concentrated\ ownership = \frac{Kepemilikan\ Saham\ Terbesar}{Total\ Saham\ Beredar}$
5. $Tax\ Avoidance = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$

Data yang telah diseleksi berdasarkan kriteria sampel kemudian ditabulasi dan dianalisis menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 25. Tahapan analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sebagai dasar untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan. Setelah model memenuhi asumsi yang diperlukan, analisis dilanjutkan dengan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (R²), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t) untuk menguji pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *institutional ownership*, dan *concentrated ownership* terhadap *tax avoidance*. Adapun persamaan regresinya dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2023) mengemukakan bahwa untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai seluruh data penelitian, dapat menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi distribusi setiap variabel, seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, median, dan standar deviasi untuk setiap variabel.

Tabel 2.

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance (Cash ETR)	258	0.032	0.487	0.226	0.084
Inventory Intensity	258	0.041	0.621	0.214	0.117
Capital Intensity	258	0.072	0.783	0.396	0.168
Concentrated Ownership	258	0.241	0.956	0.612	0.181
Institutional Ownership	258	0.103	0.918	0.587	0.176

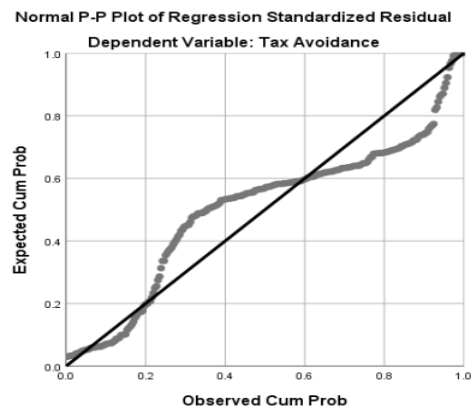
Sumber : Data Penelitian, 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 2, penelitian ini melibatkan 258 observasi untuk setiap variabel yang dianalisis. Variabel *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (Cash ETR) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,032 dan maksimum sebesar 0,487, dengan nilai rata-rata 0,226 serta standar deviasi 0,084. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata Cash ETR perusahaan dalam sampel

mencapai 22,6%. Variabel *Inventory Intensity* memiliki nilai minimum 0,041, maksimum 0,621, nilai rata-rata 0,214, dan standar deviasi 0,117. Dengan demikian, rata-rata proporsi persediaan terhadap keseluruhan aset perusahaan berada pada tingkat 21,4%. Sementara itu, *Capital Intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0,072 dan maksimum 0,783, dengan rata-rata 0,396 serta standar deviasi 0,168. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sekitar 39,6% dari total aset perusahaan dalam sampel, secara rata-rata, dialokasikan dalam bentuk aset tetap. Pada variabel *Concentrated Ownership*, nilai minimum tercatat sebesar 0,241 dan maksimum sebesar 0,956, sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,612 dengan standar deviasi 0,181. Temuan ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada pemegang saham utama mencapai 61,2%. Adapun *Institutional Ownership* memiliki nilai minimum sebesar 0,103, maksimum 0,918, rata-rata 0,587, dan standar deviasi 0,176. Artinya, rata-rata saham perusahaan dalam sampel yang dimiliki oleh pihak institusional mencapai 58,7%. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi yang terdapat pada masing-masing variabel mencerminkan adanya keragaman karakteristik antarperusahaan yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan nilai rata-ratanya, *Concentrated Ownership* memiliki nilai rata-rata paling tinggi, yaitu 0,612, sedangkan *Inventory Intensity* menunjukkan nilai rata-rata paling rendah, yaitu 0,214.

Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2021), Pengujian normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah residual dalam model regresi telah memenuhi asumsi distribusi normal. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis grafik *Normal Probability Plot* (Normal P–P Plot). Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila titik-titik residual berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola atau arah garis tersebut. Sebaliknya, apabila titik-titik residual menunjukkan penyimpangan yang cukup jauh dari garis diagonal atau membentuk pola tertentu, kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa residual tidak berdistribusi secara normal.



Sumber: Data Sekunder diolah, 2026

Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap grafik *Normal Probability Plot* (P–P Plot), titik-titik residual terlihat berada di sekitar garis diagonal serta mengikuti pola garis tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa residual dalam model regresi cenderung memenuhi asumsi normalitas. Namun, Ghozali (2021) menyatakan bahwa interpretasi normalitas melalui pendekatan grafis memiliki unsur subjektivitas, sehingga diperlukan pengujian statistik sebagai pendukung untuk memperoleh kesimpulan yang lebih objektif. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi analisis grafik dengan uji *One-Sample Kolmogorov–Smirnov*. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*), yaitu residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (*Sig. > 0,05*). Sebaliknya, nilai signifikansi kurang dari 0,05 (*Sig. < 0,05*) menunjukkan bahwa residual tidak memenuhi asumsi distribusi normal. (Ghozali, 2021).

Tabel 3.

Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov–Smirnov</i>	
Unstandardized Residual	
N	258
Mean	0.000000

Std. Deviation	0.03852174
Absolute	0.046
Positive	0.041
Negative	-0.046
Test Statistic	0.046
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200 ^c
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Hasil pengujian normalitas pada Tabel 2 melalui metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, model regresi dinilai layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya, khususnya dalam pengujian hipotesis penelitian. (Ghozali, 2021).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan linear yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Ghozali (2021) menjelaskan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, karena kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan estimasi koefisien regresi. Identifikasi multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* pada masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10 (*Tolerance* > 0,10) dan nilai VIF berada di bawah 10 (*VIF* < 10)(Ghozali, 2021). Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.
Uji Multikolinearitas *Coefficients*

No.	Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Capital Intensity	0,975	1,026	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Inventory Intensity	0,981	1,019	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Institutional Ownership	0,626	1,598	Tidak terjadi multikolinearitas
4	Concentrated Ownership	0,621	1,611	Tidak terjadi multikolinearitas
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak				

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. *Capital Intensity* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,975 dan VIF sebesar 1,026. *Inventory Intensity* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,981 dan VIF sebesar 1,019. Selanjutnya, *Institutional Ownership* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,626 dan VIF sebesar 1,598, sedangkan *Concentrated Ownership* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,621 dan VIF sebesar 1,611. Dengan demikian, seluruh variabel independen memenuhi kriteria uji multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis regresi linier berganda (Ghozali, 2021).

Uji Glesjer

Tabel 5.
Uji Glesjer

Model	t	Sig.
Capital Intensity	-0.688	0.492
Inventory Intensity	0.914	0.362
Institutional Ownership	-0.831	0.407
Concentrated Ownership	1.284	0.201

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 25 (2026).

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 5 dengan menggunakan metode Glejser, seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05. Variabel *Inventory Intensity* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,362, *Capital Intensity* sebesar 0,492, *Concentrated Ownership* sebesar 0,201, sedangkan *Institutional Ownership* sebesar 0,407. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga model tersebut layak digunakan untuk analisis regresi linier berganda. (Ghozali, 2021).

Uji Durbin-Watson

Tabel 6.
Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,563	0,317	0,306	0,05218	1,947

a. Predictors: (Constant), Inventory Intensity, Capital Intensity, Concentrated Ownership, Institutional Ownership

b. Dependent Variable: Tax Avoidance (Cash ETR)

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 25 (2026)

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,947. Menurut Ghozali (2021), model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada di sekitar angka 2 atau berada pada rentang 1,5 sampai 2,5. Dengan demikian, nilai Durbin-Watson sebesar 1,947 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi, sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi linier berganda.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7.
Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	0,412	0,058		7,103	0,000
Capital Intensity	-0,121	0,042	-0,214	-2,881	0,004
Inventory Intensity	-0,087	0,031	-0,186	-2,806	0,005
Institutional Ownership	0,073	0,026	0,177	2,808	0,005
Concentrated Ownership	-0,064	0,028	-0,149	-2,286	0,023

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 25 (2026)

$$Y = 0,412 - 0,087X_1 - 0,121X_2 - 0,064X_3 + 0,073X_4 + e$$

Keterangan:

- X_1 = Capital Intensity
- X_2 = Inventory Intensity
- X_3 = Institutional Ownership
- X_4 = Concentrated Ownership

Berdasarkan persamaan tersebut, nilai konstanta sebesar 0,412 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Tax Avoidance diperkirakan sebesar 0,412. Koefisien regresi Inventory Intensity sebesar -0,087 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Inventory Intensity

akan menurunkan Tax Avoidance sebesar 0,087, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi Capital Intensity sebesar -0,121 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan Capital Intensity akan menurunkan Tax Avoidance sebesar 0,121. Selanjutnya, koefisien regresi Concentrated Ownership sebesar -0,064 menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan terkonsentrasi sebesar satu satuan akan menurunkan Tax Avoidance sebesar 0,064. Sementara itu, koefisien regresi Institutional Ownership sebesar 0,073 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kepemilikan institusional akan meningkatkan Tax Avoidance sebesar 0,073, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8.
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,563	0,317	0,306	0,05218

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 25 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8, diperoleh nilai R Square sebesar 0,317. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, *Concentrated Ownership*, dan *Institutional Ownership* mampu menjelaskan variasi Tax Avoidance sebesar 31,7%. Sementara itu, sisanya sebesar 68,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9.

Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,318	4	0,079	29,184	0,000
Residual	0,688	253	0,003		
Total	1,006	257			

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 25 (2026)

Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 9, diperoleh nilai Fhitung sebesar 29,184 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, *Concentrated Ownership*, dan *Institutional Ownership* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10.

Uji t

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.	Keputusan
<i>Capital Intensity</i>	-0,121	-2,881	0,004	H₁ diterima
<i>Inventory Intensity</i>	-0,087	-2,806	0,005	H₂ diterima
<i>Institutional Ownership</i>	0,073	2,808	0,005	H₃ diterima
<i>Concentrated Ownership</i>	-0,064	-2,286	0,023	H₄ diterima

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 10, variabel *Inventory Intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005, *Capital Intensity* sebesar 0,004, *Concentrated Ownership* sebesar 0,023, dan *Institutional Ownership* sebesar 0,005. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Arah koefisien regresi menunjukkan bahwa *Inventory Intensity*,

Capital Intensity, dan Concentrated Ownership berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance, sedangkan Institutional Ownership berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.

Pembahasan

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Capital Intensity memiliki koefisien regresi sebesar -0,121, nilai t hitung sebesar -2,881, dan nilai signifikansi sebesar 0,004. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan Capital Intensity menyebabkan nilai Cash ETR menurun. Karena Cash ETR yang semakin rendah mencerminkan meningkatnya praktik Tax Avoidance, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan investasi aset tetap yang lebih besar cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Fenomena tersebut terjadi karena semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, semakin besar pula beban penyusutan yang dapat diakui sebagai biaya fiskal. Beban penyusutan tersebut akan mengurangi laba kena pajak sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki tingkat Capital Intensity tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak secara legal. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Arimurti et al. (2022) dan (Ravanelly & Soetardjo, 2023) yang menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak melalui mekanisme pembebanan depresiasi aset tetap.

Pengaruh Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Inventory Intensity memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,087, nilai t hitung sebesar -2,806, dan tingkat signifikansi 0,005, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima, sehingga Inventory Intensity berpengaruh signifikan terhadap Cash ETR. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi Inventory Intensity, maka nilai Cash ETR akan semakin rendah. Mengingat Cash ETR merupakan proksi pengukuran Tax Avoidance, maka penurunan Cash ETR mengindikasikan meningkatnya praktik penghindaran pajak (Jaya Baiduri Ruslan et al., n.d.). Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi persediaan yang lebih besar cenderung memiliki biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan penanganan persediaan yang lebih tinggi. Beban tersebut diakui sebagai biaya operasional yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga berdampak pada penurunan jumlah pajak yang dibayarkan. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak melalui pengelolaan persediaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Amandha Cahyamustika & Meita Oktaviani, 2024) yang menyatakan bahwa tingginya intensitas persediaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak karena perusahaan memperoleh manfaat dari meningkatnya biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.

Pengaruh Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Institutional Ownership memiliki koefisien regresi sebesar 0,073, nilai t hitung sebesar 2,808, dan tingkat signifikansi sebesar 0,005. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Institutional Ownership, maka nilai Cash ETR akan semakin tinggi. Karena peningkatan Cash ETR mencerminkan semakin rendahnya praktik Tax Avoidance, maka dapat diartikan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa investor institusional memiliki fungsi pengawasan (*monitoring*) yang efektif terhadap tindakan manajemen. Pengawasan tersebut mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan sehingga mengurangi kecenderungan melakukan strategi penghindaran pajak yang berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun risiko reputasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Lastyanto & Setiawan, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Temuan ini juga mendukung pandangan Agency Theory yang menjelaskan bahwa keberadaan pemegang saham institusional dapat menekan konflik keagenan melalui mekanisme pengawasan yang lebih kuat sehingga tindakan oportunistik manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak, dapat diminimalkan.

Pengaruh Concentrated Ownership terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Concentrated Ownership memperoleh koefisien regresi sebesar -0,064, nilai t hitung sebesar -2,286, dan nilai signifikansi sebesar 0,023. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga diterima. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham yang terpusat pada pemegang saham mayoritas, maka nilai Cash ETR akan semakin rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Concentrated Ownership, semakin tinggi pula praktik Tax Avoidance. Secara teoritis, pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan yang lebih besar dalam memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Dalam upaya memaksimalkan keuntungan setelah pajak, pemegang saham pengendali dapat mendorong manajemen untuk menerapkan strategi efisiensi pajak yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Kinanti et al., 2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi meningkatkan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak demi memaksimalkan nilai perusahaan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Inventory Intensity, Capital Intensity, Concentrated Ownership, dan Institutional Ownership secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Secara parsial, Inventory Intensity, Capital Intensity, dan Concentrated Ownership terbukti berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance yang diproksikan menggunakan Cash Effective Tax Rate (Cash ETR), di mana peningkatan ketiga variabel tersebut cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak. Sementara itu, Institutional Ownership berpengaruh signifikan dengan kecenderungan memperkuat fungsi pengawasan sehingga dapat menekan praktik Tax Avoidance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik investasi perusahaan dan struktur kepemilikan memiliki peran penting dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi praktik Tax Avoidance.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar perusahaan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) serta mengelola investasi aset tetap dan persediaan secara efektif dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan memperkuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama pada perusahaan yang memiliki karakteristik aset dan struktur kepemilikan tertentu. Implikasi penelitian ini adalah memberikan informasi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, khususnya *capital intensity*, *inventory intensity*, *institutional ownership*, dan *concentrated ownership*. Bagi investor, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kebijakan perpajakan dan struktur kepemilikan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Sementara bagi pemerintah dan otoritas pajak, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki karakteristik tertentu yang berpotensi melakukan *tax avoidance*. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian dengan menambah variabel, periode, objek penelitian, maupun menggunakan proksi *tax avoidance* yang berbeda agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Alm, J. (2023). *Tax Compliance and Administration*. 72.
- Amandha Cahyamustika, M., & Meita Oktaviani, R. (2024). PENGARUH PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- Anggraini, F., & Wijaya, S. (2024). THE EFFECT OF LEVERAGE AND CAPITAL INTENSITY ON TAX AVOIDANCE WITH INSTITUTIONAL OWNERSHIP AS A MODERATING VARIABLE (Vol. 4, Number 11). <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i11.1302>

- Arimurti, T., Astriani, D., & Sabaruddin. (2022). PENGARUH LEVERAGE, RETURN ON ASSET (ROA) DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 299–315. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.299-315>
- Cristan, Y., & Poniman, P. (2023). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(2), 1096–1112. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1408>
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2018). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Accessibility support: If you experience accessibility issues with this file, report them here Agency Theory: An Assessment and Review. In *Source: The Academy of Management Review* (Vol. 14, Number 1). <https://www.jstor.org/stable/258191>
- Firmansyah, A., Akuntansi, J., Keuangan, P., Stan, N., & Ardiansyah, R. (2020). BAGAIMANA PRAKTIK MANAJEMEN LABA DAN PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID19 DI INDONESIA? (Vol. 24). www.idx.co.id.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2020). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2), 127–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- IAI. (2024). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14: Persediaan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (10th ed.)* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya Baiduri Ruslan, N., Ilyas, K., & Nursyamsi, I. (n.d.). *The Determinants Of Tax Avoidance In Manufacturing Companies*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Juliani, A. S., & Finatariani, E. (2023). Institutional Ownership, Tax Planning And Tax Avoidance Effect On Firm Value. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(2), 168–183. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i2.1370>
- Juventius Tanamal, J., & Nariman, D. A. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.14966>
- Kinanti, S. P., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Putra, D. A. (2023). The Effect of Concentrated Ownership on Tax Avoidance: CSR Mediates or Moderates. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v5i1.999>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/beba0634-en>
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Rakayana, W., Sudarma, M., & Rosidi, R. (2021). structure of company ownership and tax avoidance in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3). <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>
- Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). THE EFFECT OF FINANCIAL DISTRESS, THIN CAPITALIZATION AND CAPITAL INTENSITY ON TAX AVOIDANCE. *Soetardjo Klabat Accounting Review* |, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.921.55-78>
- Salam, A. A., Musa, A. A., Abdel, A., Rawy, K., Nasr, S., & Mostafa, A. (2019). Ownership Concentration and Corporate Governance. *Journal of Educational Sciences*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21608/svuja.2019.181642>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutisional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sijabat, Y. P., Sinabutar, M. J., Hirawati, H., & Giovanni, A. (2020). The Determination of Concentration and Type of Ownership on Bank Performance and Risks in Indonesia. *Society*, 8(1), 191–203. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.152>
- Urrahmah S, & Mukti, A. H. (2021). The Effect of Liquidity, Capital Intensity, And Inventory Intensity on Tax Avoidance. *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH*, 9(12), 1–16. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i12.2021>